

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran media massa sangat menentukan dalam penyampaian informasi maupun suatu kebijakan pemerintah dan demokrasi (Zubaidi, dkk., 2020, hlm. 79). Pemberitaan media memiliki dampak besar terhadap menentukan opini masyarakat. Jika dalam pemberitaan memuat berita buruk maka secara tidak langsung opini dan perilaku masyarakat juga akan terpengaruh sehingga, media dianggap memiliki peran yang besar dalam mengambil keputusan. Oleh karenanya, sebagai perantara sosial yang menjadi saluran informasi untuk masyarakat, media haruslah memperhatikan integritas dan kepercayaan publik (Rachmadi, 1990, hlm. 23).

Menurut Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan Indonesia, pers diinterpretasikan sebagai alat untuk menggalakkan perubahan, sebagai mekanisme pengawasan sosial, sebagai sarana pendidikan, sebagai saluran penyampaian informasi dan pengaruh terhadap opini publik, serta sebagai elemen dalam pergerakan massa (Musman dan Mulyadi, 2021, hlm. 70). Oleh karena itu, pers lahir sebagai respons terhadap tuntutan sosial dan tidak memiliki eksistensi yang mandiri; sebaliknya, pers dipengaruhi oleh serta berpengaruh terhadap lembaga kemasyarakatan lainnya. Akibatnya, pendekatan jurnalisme pers akan disesuaikan dengan audiens yang menjadi targetnya. Jika audiens pembaca berbeda, maka bahasa yang digunakan dalam pemberitaan juga akan berbeda. Hal ini disebabkan pers memiliki peran penting dalam menyampaikan kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat di mana pers dapat bertindak sebagai alat yang efektif dalam mempertemukan pemerintah dengan masyarakat (Musman dan Mulyadi, 2021, hlm. 14).

Fungsi pers sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah digunakan sebagai alat penyampaian gagasan dan argumentasi berdasarkan fakta-fakta maupun realita di lapangan. Hal ini dikarenakan pers memiliki peran untuk memberikan *news and views* (berita dan opini) kepada masyarakat (Suwirta, 2008, hlm. 48). Artinya, peranan pers sebagai kontrol sosial sangat penting dalam memegang kendali yang

cukup kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui pers kita juga dapat melihat bagaimana kondisi suatu negara pada suatu zaman.

Sejarah pers sebagai alat kontrol sosial mencakup banyak peristiwa yang memperlihatkan bagaimana media pers telah berperan aktif dalam mengawasi pemerintahan dan mengungkap ketidakadilan. Salah satu contoh yang mengesankan adalah peran media pers selama kasus Watergate di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Koran Washington Post dengan ketekunan dan keberanian jurnalisnya, Woodward dan Bernstein (2014, hlm. 35), mendedikasikan diri mereka untuk menginvestigasi skandal politik tersebut. Mereka membongkar serangkaian kebijakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Richard Nixon, termasuk upaya-upaya untuk menutupi penyadapan dan sabotase terhadap lawan politiknya. Melalui pemberitaan yang teliti dan terus-menerus, mereka mengungkap kebobrokan dalam pemerintahan dan memaksa Nixon untuk mengundurkan diri.

Pada masa Revolusi Prancis, pers Prancis berperan penting dalam mengkritik rezim monarki yang korup. Publikasi seperti *L'Ami du Peuple* yang dipimpin oleh Jean-Paul Marat dan koran *Le Père Duchesne* yang ditulis oleh Jacques Hébert menjadi suara penting dalam menyuarakan ketidakpuasan rakyat terhadap ketidaksetaraan sosial dan politik (McChesney, 2016, hlm. 64). Mereka menggambarkan ketidakadilan sosial yang dialami oleh rakyat biasa dan mendesak perubahan. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana pers bertindak sebagai agen kontrol sosial dengan menggali fakta-fakta yang penting dan mengungkapkan pelanggaran etika dan hukum oleh pemerintah. Pers dapat dilihat begitu membantu memicu perubahan sosial yang mendalam, dan melalui pemberitaannya yang kritis, mereka berperan sebagai agen kontrol sosial yang memperjuangkan keadilan dan perubahan dalam masyarakat (Nugroho, dan Samsuri, 2013, hlm. 291).

Berkembangnya media massa yang semakin pesat seiring dengan berjalannya waktu, siapa pun memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pemikiran dan tulisan mereka melalui media cetak, media elektronik, hingga internet. Terkhusus di Indonesia sejarah awal perkembangan pers terbagi ke dalam dua periode perkembangan (Darwis, 2018, hlm. 6). Periode pertama (1744-1854) ditandai oleh

kepentingan informasi kaum Eropa, yang mengakibatkan munculnya surat kabar dengan redaksi dan bahasa Belanda yang masih dominan. Sementara itu, periode kedua terjadi selama pemerintahan kolonial Belanda yang menerapkan kebijakan politik etis sebagai respons terhadap penduduk pribumi di Hindia-Belanda, mencakup program pendidikan untuk rakyat jajahannya (Poesponegoro, dkk, 2010, hlm. 24). Dengan begitu pers di Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh luar yang selaras dengan keinginan untuk menyebarkan informasi dengan lebih luas kepada masyarakat agar menambah pengetahuan dan pemahaman mereka. Kemudian menghasilkan kelompok intelektual pribumi yang berkontribusi pada munculnya surat kabar dalam bahasa Melayu dan bahasa lokal dari berbagai daerah di Hindia-Belanda, seperti *Bromartani* di Solo (1855), *Pewartu Hindia* di Bandung (1894), *Tjahaya Soematra* di Sumatera Barat (1897), dan lainnya (Poesponegoro, dkk, 2010, hlm. 318-321).

Pada masa pergerakan nasional, fungsi pers sebagai kontrol sosial terlihat signifikan melalui penggunaannya sebagai salah satu alat perjuangan pergerakan. Hubungan pergerakan nasional dan pers pribumi tidak dapat dipisahkan karena saling memiliki ketergantungan serta hidup berdampingan untuk saling mempertahankan eksistensinya (Kartodirdjo, 2018, hlm. 135). Perkembangan pers juga semakin meningkat diawali dengan adanya pelopor pers pribumi yaitu surat kabar *Medan Prijaji* di Bandung tahun 1907 dengan Raden Mas Tirtoadisuryo sebagai redaktornya. *Medan Prijaji* menjadi surat kabar yang memuat tentang kritikan terhadap kolonial Belanda serta pemikiran mengenai kebangsaan. Melalui surat kabar *Medan Prijaji* tersebut menjadi bentuk awal perlawanan kepada kolonial Belanda melalui media massa. Hal tersebut menjadikan surat kabar pribumi lainnya secara terang-terangan menyebarkan ide-ide nasionalisme dan pergerakan juga turut menyuarakan kritikan serta pergerakan melawan kolonial Belanda. Di masa ini pers berfungsi sebagai alat untuk membantu tumbuhnya pemikiran kritis dan kesadaran masyarakat pribumi untuk melakukan gerakan yang dapat menyikapi zaman dan juga menampung beberapa aspirasi pribumi untuk menciptakan suatu gerakan menuju kemajuan (Kartodirdjo, 2018, hlm. 133).

Wajah pers Indonesia telah berubah dari waktu ke waktu. Pada masa Orde Lama, khususnya pada tahun 1960, pers memiliki kewajiban untuk mendukung dan

mempertahankan Manifesto Politik Republik Indonesia, Keputusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, informasi perubahan kebijakan selama masa Demokrasi Terpimpin dan kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Memasuki masa Orde Baru di tahun 1965, ketentuan pelaksanaan media massa disterilkan oleh perlunya penerbitan izin publikasi atau Surat Izin Terbit (SIT) tetap diperlukan (Taufik & Surjomiharjo, 2002, hlm. 181). Pada tanggal 26 Maret 1965, pemerintah mewajibkan organisasi pers untuk bergabung dengan partai politik, sehingga seiring berjalannya waktu, organisasi pers yang tergabung dalam partai yang kuat juga semakin kuat dari segi bisnisnya, tetapi pers yang memutuskan untuk berada di dalam jalur independen memiliki izin dan ruang gerak terbatas (Hill, 2012, hlm. 95).

Perubahan regulasi pers di Indonesia terlihat signifikan berdasarkan dengan periode yang mewakili suatu masa. Pada masa Orde lama dengan prinsip demokrasi terpimpin pemerintahan lebih banyak menerapkan asas Manipol Usdek sehingga pers pada masa ini harus tegas dan jelas dalam menyuarakan aspirasi politik tertentu (Dewan Pers, 2020). Pada era ini juga adanya tindakan tegas dari pemerintah apabila terdapat majalah, media massa, surat kabar, dan kantor penerbitan yang tidak dapat menaati peraturan dalam penerbitan pers maka akan menerima sanksi pembredelan. Pers pada periode Orde Lama sangat memperketat sensor dengan sepihak (Persatuan Wartawan Indonesia, 2019, dalam Sukmahandi, 2022, hlm. 50).

Perizinan dan kontrol ketat yang dimiliki pemerintahan Orde Baru terhadap keberadaan pers akhirnya menimbulkan sebuah kritik sosial pada media massa di Indonesia (Mallarangeng, 1992, hlm. 17). Hal tersebut secara umum disebabkan karena para lembaga pers merasa terlalu kerasnya sensor opini publik oleh pemerintah Orde Baru. Namun, tidak menjadi halangan bagi media untuk menyajikan berita yang kritis, inklusif dan independen. Seperti contoh mengenai pemberitaan yang mengkritisi peristiwa-peristiwa demonstrasi, Peristiwa Malari 1974, Peristiwa 5 Agustus 1973, bahkan kegiatan Pemilu 1971 maupun mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru akan dianggap telah mencampuri urusan pemerintah di bidang politik dan ekonomi yang akhirnya menyebabkan sesuatu pelarangan atau pemberhentian penyiaran kepada publik yang dikenal sebagai pembredelan dengan pencabutan SIT maupun Surat Izin Cetak oleh

Menteri Penerangan. Supaya dapat kembali beredar dalam publik, redaksi media massa tersebut perlu menandatangani persetujuan antara lembaga pers dengan Menteri Penerangan dengan ketentuan sesuai arahan pemerintah Orde Baru (Suwirta, 2021, hlm. 6).

Dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru tanggal 21 Mei 1998, pers memasuki periode reformasi yang menghendaki adanya perubahan terhadap semua sektor pembangunan, salah satunya adalah sektor politik yang menonjolkan kemerdekaan dan kebebasan pada periode ini. Euforia kebebasan ini dapat dirasakan karena adanya pencabutan peraturan Menteri Penerangan tentang Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP), pembubaran Departemen Penerangan dan adanya perubahan tentang pokok-pokok pers yang membahas mengenai kebebasan pers dari pembredelan. Juga lahirnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yang melindungi pers dari kebebasan berekspresi yang dilindungi dalam HAM setiap individu (Harahap, 2019, hlm 136-137).

Perjalanan peristiwa sejarah tersebut menjadikan pers Indonesia harus mengubah paradigma lama yang mengekang kebebasan pers menjadi lembaga independen yang berpihak pada kebenaran. Pers Indonesia sebagai kontrol sosial sendiri tidak hanya berjalan dengan menanamkan nilai persatuan dan kebangsaan Indonesia, tetapi juga terkadang berupaya mempromosikan program pemerintah, menyoroti kebijakan pemerintah secara kritis, atau sekadar mendukung kebijakan pemerintah. Namun, dalam berbagai peran tersebut, pers harus tetap menjadi lembaga yang merespon perubahan sesuai dengan kepentingan warga negara Indonesia (Susanto, 2010, hlm. 19).

Pasca Orde Baru, euforia jurnalistik melahirkan revolusi informasi dengan lahirnya peraturan-peraturan kebebasan pers seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terbukanya kebebasan pers pasca Orde Baru membuat media massa semakin nyaring bersuara. Tidak hanya surat kabar yang mengkritik pemerintahan, adapun majalah yang hingga saat ini terus nyaring dan mengkritisi pemerintah seperti, Majalah Tempo yang hadir dengan menyajikan cara penulisan *feature* dalam pemberitaannya. Majalah Tempo adalah majalah mingguan independen yang berbasis di Indonesia. Majalah ini didirikan pada tahun 1971 oleh Goenawan Mohamad, seorang jurnalis dan budayawan terkemuka di Indonesia, dan

para rekannya di Kompas Gramedia sebagai redaktur pelaksana (Harsono, 2005, hlm. 95). Tempo hadir dengan modal dari Yayasan Jaya Raya sebagai hasil perbedaan pendapat Goenawan Mohammad dan rekan-rekannya. Pada Februari 1971 Majalah Tempo mengeluarkan majalah edisi pertama dengan cover “Tragedi Minarni dan Kongres PBSI” dengan Jaya Pers sebagai penerbit. Tahun 1974 Yayasan Jaya Raya dan PT. Pikatan mendirikan PT. Grafiti Pers dengan maksud agar karyawan Tempo berkesempatan memiliki saham bersama (Widoyo, 2022, hlm. 53). Perubahan kebijakan tersebut sekaligus membawa Tempo lebih terlihat segar dalam pemberitaannya dan menarik pasar namun, dalam perjalanan terbitnya Tempo mengalami tantangan dari pemerintah.

Pada 1982 untuk pertama kalinya Tempo dilarang terbit selama satu bulan dengan anggapan terlalu mengkritik kegiatan pemilu dimasa Orde Baru. Bentuk peringatan yang diberikan pemerintah tersebut tidak membuat Tempo berhenti untuk lebih menajamkan investigasi beritanya. Tanggal 21 Juni 1994, Majalah Tempo kembali dibredel pemerintah melalui Menteri Penerangan, Harmoko karena dinilai terlalu keras mengkritik pembelian kapal bekas dari Jerman Utara (Novel, 2014, hlm. 37). Tahun 1998 setelah berakhirnya Orde Baru, mantan karyawan Tempo kembali berkumpul dan memuuskan untuk menerbitkan kembali Majalah Tempo di bawah naungan PT. Arsa Raya Perdana hingga tahun 2001 Tempo meningkatkan skala bisnis dengan mengubah nama menjadi PT. Tempo Inti Media (Tempo, 2008, hlm 10)

Majalah Tempo sebagai salah satu media massa yang memuat berita politik menawarkan perbedaan sajian berita yang dibungkus dalam tata bahasa prosa, dan anekdot juga mengedepankan peliputan berita yang jujur dan berimbang (Sofian, 2019, hlm. 7). Majalah Tempo merupakan salah satu media cetak ternama di Indonesia yang dikenal dengan jadwal penerbitannya yang sangat aktif. Majalah ini terbit hingga empat atau bahkan lima edisi setiap bulannya, menjadikannya salah satu sumber berita yang paling sering diperbarui di Indonesia (Mohammad, 1997, hlm. 34). Keaktifan Tempo dalam menerbitkan edisi-edisi berkala tersebut mencerminkan komitmennya untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada pembacanya (Harsono 2005, hlm. 82). Dengan jadwal penerbitan yang sering, Tempo dapat memberikan cakupan yang lebih mendalam terhadap berbagai

topik berita, mencakup isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini membuat Majalah Tempo menjadi salah satu sumber informasi yang penting dan berpengaruh dalam membentuk pandangan dan diskusi publik di Indonesia. Pada ranah pemberitaannya, Majalah Tempo menampilkan berita dan artikel tentang politik, budaya, dan sosial di Indonesia dan dunia. Dari awal berdirinya, Tempo berkomitmen untuk menjadi sumber berita independen dan netral, yang tidak terikat dengan kepentingan politik atau bisnis tertentu (Tempo, 2008, hlm. 11). Majalah Tempo berusaha untuk memberikan informasi yang objektif dan kritis, dan menghindari terjadinya praktik jurnalisme yang memihak atau merugikan pihak tertentu (Harsono, 2005, hlm. 96). Sejak saat itu, Tempo menjadi ikon jurnalisme independen dan kritis di Indonesia.

Pada awal 1990-an kebijakan politik dikenal sebagai masa *kebijakan keterbukaan*. Dalam wawancara Tempo pada 8 Juli 1998 dengan Soemitro, mantan pangkopkamtib menyatakan bahwa kebijakan keterbukaan mengacu pada ketika segala sesuatu dibicarakan secara terbuka, dalam hal ini tidak ada lagi rasa takut untuk membicarakan topik-topik yang tabu, misterius, dan tertutup (Rosyada, dkk, 2022, hlm. 43). Sebagai salah satu media politik yang berani mengeluarkan investigasi berdasarkan fakta akhirnya pada tahun 1994, Tempo kembali mengulas berita akuisisi 39 kapal bekas Jerman Timur yang juga pernah dikeluarkan pada edisi 7 November 1992 (Rosyada, dkk, 2022, hlm 45). Kabar itu rupanya menjadi pembicaraan hangat antara Habibie, Menteri Riset dan Teknologi, dan Mar'ie Muhammad, Menteri Keuangan. Hal ini kembali menjadi perhatian publik karena kejanggalan dana yang diajukan Habibie terlalu besar dan ditolak oleh Mar'ie sebanyak tiga kali. Dengan terbitnya berita tersebut, pemerintah memberikan sanksi larangan terbit pada 21 Juni 1994. Akhirnya menyebabkan Tempo dipandang sebagai media yang melakukan adu domba internal pemerintah dan mengganggu stabilitas nasional dengan memprovokasi pembelian bekas kapal perang Jerman Timur dan menempatkan karikatur B.J Habibie dalam sampul halaman depan Majalah Tempo edisi 11 Juni 1994 (Rosyada, dkk, 2022, hlm. 45-46).

Hal ini tentu saja menjadi bentuk alasan politik yang merugikan untuk Tempo dengan adanya pelarangan izin pers yang merupakan tindakan kurang efektif akibat penyalahgunaan kekuasaan negara yang digunakan pemerintah. Pembredelan

Majalah Tempo juga dinilai sebagai salah satu hal yang mencoreng perpolitikan di Indonesia karena tindakan yang diberikan pemerintah membuat kepercayaan masyarakat menurun. Pasca pembredelan pada 28 Juni 1994 terjadi pembicaraan sejumlah wartawan Tempo dan *DeTik* dengan pimpinan komisi I DPR RI untuk meminta pertimbangan dan pembatalan SIUPP. Akan tetapi, komisi I hanya memberikan jawaban menggantung dan tidak memuaskan sehingga lahirlah memorandum Indonesia 1994 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta yang ditandatangani oleh puluhan wartawan, budayawan, dan kolumnis. Memorandum tersebut dimaksudkan untuk pemerintah melakukan tindakan koreksi secara terbuka kepada rakyat dalam menegakan keadilan lewat jalur proses hukum yang jujur (Rosyada, dkk, 2022, hlm. 48). Setelah berakhirnya masa pemerintahan Soeharto, mantan wartawan Tempo kembali berkumpul dan memutuskan untuk menerbitkan kembali Majalah Tempo pada 12 Oktober 1998 dengan Goenawan Mohamad sebagai redaktur.

Perkembangan pers dari masa ke masa sebagai media kontrol sosial pada setiap periodenya memiliki banyak sekali perbedaan. Maka dari itu, pers menjadi media terpenting sepanjang tahun dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Sebelum ada Tempo, hanya ada dua jenis penulisan dalam koran dan majalah di Indonesia yaitu, berita yang lempang atau berita langsung (*straight news*) seperti koran, atau artikel. Berita lempang (*straight news*) merupakan berita yang muncul di suatu kabar karena melaporkan peristiwa secara cepat atau langsung pada sasaran tanpa mencampurkannya dengan opini penulis (Wahjuwibowo, 2015, hlm. 46). Sedangkan Tempo menggunakan penulisan dengan cara menyusun sebuah berita tentang sebuah kejadian sebagai sebuah cerita pendek (Mohammad, 1997, hlm. 18). Tempo memanfaatkan penulisan dengan menggunakan cerita *feature* yang merupakan artikel kreatif, kadang-kadang subjektif, yang terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada pembaca suatu kejadian, keadaan, atau aspek kehidupan (Mohammad, 1997, hlm, 18). Dengan demikian konsep Tempo yang menggunakan *feature* berbeda dengan sajian berita lempang pada umumnya, walaupun memiliki unsur berita yang mirip *feature* menuliskan berita dengan mengedepankan gaya kreativitas pengutaraan dari penulis dengan gaya bahasa yang dapat memikat imajinasi pembacanya. Penulisan berita *feature*

memang menampilkan tingkat subjektivitas penulis namun, jenis berita ini mampu menarik minat pembaca sekaligus memberikan informasi dan menghibur (Wahyuwibowo, 2015, hlm. 87).

Majalah Tempo mengembangkan gaya jurnalisme investigatif yang kuat, dengan menyajikan laporan-laporan yang mendalam tentang berbagai isu seperti korupsi, lingkungan, hak asasi manusia, dan konflik politik dan sosial (Herfan, 2015, hlm. 26). Pemberitaan Majalah Tempo selalu ditandai dengan kualitas dan ketelitian dalam penyajian fakta, serta pandangan yang kritis dan independen terhadap peristiwa yang telah diinvestigasi. Bentuk pelaksanaan jurnalisme investigasi di Indonesia baru ditetapkan pada tahun 1969 di bawah pimpinan Mochtar Lubis dengan *Harian Indonesia Raya* yang berhasil menurunkan beberapa laporan investigasi di era Orde Baru (Touwe, 2014, hlm. 120). Pasca Reformasi, Majalah Tempo banyak menurunkan laporan investigasi berita yang mengkritisi kebijakan pemerintahan. Tercatat pada periode 1999-2010 Majalah Tempo menerbitkan 110 laporan investigasi (Setyarso, dkk, dalam Touwe, 2014, hlm. 120).

Identitas Majalah Tempo tidak terlepas dari orang-orang penting di belakangnya seperti sosok Goenawan Mohamad yang memberikan warna dalam gaya penulisan laporan investigasi Majalah Tempo. Nama dari sosok Goenawan Mohamad semakin dikenal menjelang akhir Orde Lama, Goenawan Mohamad dan rekan-rekannya menyusun Manifes Kebudayaan (Manikebu) pada 1964 sebagai bentuk pernyataan mereka dalam paham filosofi tentang nilai kemanusiaan pada kehidupan dunia. (Tempo, 2022, hlm. 9-10). Setelah berakhirnya Orde Lama, Goenawan Mohammad memulai karirnya sebagai wartawan di harian Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan menjadi redaktur ditahun 1969-1970 sebelum akhirnya bergabung mendirikan Majalah *Ekspres* di tahun 1970. Selama menjadi redaksi di Majalah *Ekspres*, Goenawan Mohammad dan rekan-rekannya memiliki pandangan yang berlawanan sehingga memutuskan untuk berpisah dan mencoba mendirikan Majalah Tempo pada tahun 1971 (Tempo, 2008, hlm, 10).

Majalah Tempo merupakan perwujudan ideal dari visi dan misi Goenawan Mohammad sebagai wartawan yang memiliki keinginan untuk membuat kombinasi antara jurnalistik dan sastra. Melalui Majalah Tempo, Goenawan Mohammad kemudian melahirkan rubrik Catatan Pinggir (Caping) sebagai ruang untuk dirinya

menyampaikan kritik terhadap pemerintahan di Indonesia. Kelarisan Majalah Tempo tidak terlepas dari keistimewaan dari rubrik Catatan Pinggir yang dimilikinya. Sebagai majalah yang terkenal dengan kegiatan investigasi politik pemerintah, Majalah Tempo menjadi media cetak yang berhasil mengambil hati pembacanya dengan menedukasi dan menjadi penyambung informasi antara pemerintah dan masyarakat (Novel, 2014, hlm. 7).

Pada awal masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Majalah Tempo memuji program pemerintah yang dianggap pro-reformasi dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Majalah Tempo mulai mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap tidak sesuai dengan harapan dan janji kampanyenya. Salah satu isu yang paling banyak diliput oleh Majalah Tempo pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah isu korupsi (Touwe, dkk, 2014, hlm. 121). Salah satu alasan utama Tempo begitu giat dalam mengkritisi pemerintahan SBY adalah karena adanya kebebasan pers yang lebih besar dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Setelah era Orde Baru berakhir, Indonesia mengalami liberalisasi media yang memberikan lebih banyak ruang bagi media independen seperti Tempo untuk mengungkapkan pandangan dan melakukan kontrol sosial (Touwe, dkk, 2014). Majalah Tempo terus menyuarakan pentingnya pemberantasan korupsi dan memperjuangkan keadilan bagi korban korupsi di Indonesia.

Selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat beberapa kasus korupsi yang menjadi sorotan, seperti skandal Bank Century, dan kasus Megaproyek Hamballang. Tempo dengan tekun menyelidiki kasus-kasus tersebut dan membeberkan informasi yang penting bagi masyarakat (Touwe, 2014, hlm. 7). Peran media ini dalam mengungkapkan ketidakadilan dan melibatkan publik dalam memantau pemerintahan sangat penting. Pada pemerintahan sebelumnya, terutama pada masa Orde Baru, sering kali memiliki kendali yang lebih ketat atas pemberitaan media, sehingga kritik terhadap pemerintahan tersebut cenderung dibatasi dan risikonya lebih tinggi (Novel, 2014). Pada tahun 2010, Majalah Tempo menerbitkan laporan investigasi tentang kasus korupsi Century yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan dan bank-bank besar di Indonesia. Laporan tersebut menyebabkan kontroversi dari berbagai pihak dan kemudian dituntut oleh pihak

yang merasa dirugikan, Bambang Soesatyo (2013) menuliskan buku mengenai skandal bank century dan menyanggah beberapa tuntutan yang diberikan oleh Majalah Tempo terkait keterlibatannya dalam kasus bank century.

Selain pemberitaan isu korupsi, Majalah Tempo juga meliputi berbagai berita yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono seperti, Tempo menerbitkan edisi khusus tahunan dari pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Jusuf Kalla namun, edisi tersebut berhenti di tahun 2008 dikarenakan Tempo mengintevigasi lebih lanjut mengenai hubungan politik keduanya di persiapan pemilu 2009. Hasil dari pemberita investigasi yang diberikan Majalah Tempo menimbulkan tanggapan pro dan kontra dari beberapa kalangan (Novel, 2014, hlm. 46). Tidak heran banyak sekali penelitian ataupun buku yang membahas mengenai *framing* pemberitaan Majalah Tempo yang dinilai kritis dalam investigasi beritanya.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan topik *framing* media di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dari sudut pandang *News & Views* Majalah Tempo yaitu, Mochtar Touwe, dkk (2014) yang mengkaji terhadap pandangan Majalah Tempo terkhusus kepada permasalahan kasus korupsi Hambalang di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui hasil penelitian tersebut, Touwe menyatakan bahwa terdapat sebanyak 15 naskah investigasi yang dipublikasikan majalah Tempo dalam tiga edisi majalah. Naskah tersebut menyebutkan nama 6 terdakwa dan bagaimana keterlibatan mereka dalam proyek Hambalang. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Majalah Tempo bertujuan untuk memberikan kesan dan bentuk kepercayaan dari penulis dengan fakta dari keterlibatan para terdakwa dari investigasi sehingga, masyarakat dapat memilih sikap dan menilai secara positif atau negatif terhadap petinggi negara, pengusaha besar, dan pimpinan partai politik.

Investigasi ini menjelaskan bagaimana kritisnya Majalah Tempo dalam menginvestigasi kasus korupsi proyek Hambalang di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun hasil kajian Novel (2014) yang juga membahas bagaimana Majalah Tempo membahas bagaimana Majalah Tempo melakukan pemberitaan di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kajiannya, Novel menjelaskan hasil *framing* yang diberikan Tempo mengenai keterlibatan

putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono yaitu, Edhie Baskoro dalam kasus proyek Hambalang sehingga mempengaruhi bagaimana kewibawaannya sebagai seorang pemimpin negara sekaligus pemerintahan saat itu.

Penelitian tersebut menjelaskan peristiwa yang telah terjadi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dari sudut pandang Majalah Tempo. Namun, pembahasan mengenai peristiwa korupsi Hambalang hanya dipaparkan dalam bentuk berita saja tidak menjelaskan bagaimana opini dari Majalah Tempo. Terlebih banyak peristiwa yang melibatkan media massa di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang belum diteliti salah satu contohnya mengenai kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan konflik GAM atau peristiwa Bank Century yang melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir kepemimpinannya. Hal ini kemudian menarik untuk diteliti lebih lanjut agar memperjelas bagaimana proses investigasi yang dilakukan Majalah Tempo dalam memandang berita.

Selanjutnya topik mengenai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dari sudut pandang politik, yaitu Supriadi, dkk (2022) mengkaji tentang *Peran dan Gagasan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Resolusi Konflik Aceh*. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang komitmen politik yang digunakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengakhiri konflik. Dimana dijelaskan mengenai keberanian SBY-JK dalam mengambil resiko dalam merajut damai Aceh, tragedi Tsunami Aceh yang menjadi pintu peluang kedekatan penyelesaian konflik, dan pandangan GAM yang juga berkomitmen dalam merealisasikan konflik. Sehingga keberhasilan penyelesaian konflik ini dianggap menjadi contoh dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengakhiri permasalahan dengan jalur non militeristik. Dalam penjelasan penelitian tersebut hanya membahas seputar bagaimana pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menggambil hati dan menyelesaikan permasalahan konflik di Aceh. Penelitian tersebut tidak membahas sudut pandang media atau pers padahal, peristiwa mengenai konflik ini banyak disoroti oleh media salah satunya Majalah Tempo. Sehingga penelitian tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam kepenulisan skripsi ini.

Berdasarkan proses pengumpulan data dan interpretasi dari penelitian terdahulu dirasa penelitian mengenai pandangan sebuah media dan pemberitaan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih sedikit dibahas terutama dalam kaitannya dengan peristiwa sejarah dan pendidikan sejarah. Padahal Majalah Tempo hingga saat ini memiliki peranan penting dalam berjalannya pemerintahan di Indonesia terutama dalam bidang pers.

Ketertarikan untuk melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan yang diberikan oleh pemberitaan Majalah Tempo terhadap kebijakan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode pemerintahan serta lebih memfokuskan lagi *news & views* yang diberikan oleh Majalah Tempo kepada kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono. Ruang lingkup periode penelitian ini dimulai dari tahun 2004 saat Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilu secara demokrasi di Indonesia untuk pemilihan Presiden. Akhir batasan penelitian ini tahun 2014 di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di putaran keduanya memimpin negara sebagai presiden.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka, dinilai penting untuk melakukan penelurusan lebih lanjut mengenai rumusan masalah yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu “News & Views Majalah Tempo Terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)”. Sebagai batasan agar tidak meluas dan terfokusnya penelitian ini adapun pembagian fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *views* Majalah Tempo terhadap kebijakan pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)?
2. Bagaimana *news* Majalah Tempo terhadap kebijakan pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)?
3. Bagaimana *framing* Majalah Tempo dalam berita-berita yang berkenan dengan kebijakan pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) di bidang sosial, budaya, dan ekonomi?
4. Bagaimana respon pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) terhadap *news & views* Majalah Tempo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan keterangan mengenai cara pandang Majalah Tempo terhadap kebijakan-kebijakan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan mengetahui dari *views* Majalah Tempo yang berikatan dengan pemberitaan pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).
2. Menjelaskan dan mengetahui *news* Majalah Tempo dalam pemberitaan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).
3. Menganalisis *framing* Majalah Tempo dalam berita-berita yang diterbitkan sehubungan dengan kebijakan sosial, budaya, dan ekonomi pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).
4. Menjelaskan respon pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) terhadap *news & views* Majalah Tempo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun manfaat dari penelitian secara khusus penulis haarapkan adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

1. Memperkaya khasanah penulisan mengenai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
2. Memberikan sumbangsih kepada masyarakat akademik berupa penelitian ilmiah dalam perkembangan disiplin Ilmu Sejarah dan Pendidikan Sejarah.
3. Memberikan suatu manfaat sebagai rujukan penulisan lain yang berkenaan mengenai tokoh, pers, maupun sejarah nasional Indonesia.

2. Praktis

1. Bagi Pembaca
Memberikan pengetahuan baru terkait pandangan media cetak yaitu Majalah Tempo terhadap politik di Indonesia.
2. Bagi Masyarakat
Memberikan informasi serta wawasan bagi masyarakat umum mengenai peranan dan pandangan Majalah Tempo selama pemberitaan di era reformasi.
3. Bagi Guru dan Tenaga Pendidik
Memperkaya materi pembelajaran sejarah wajib kelas XII di SMA/Sederajat dalam Kompetensi Dasar 3.4 menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi.

1.5 Stuktur Organisasi Skripsi

Adapun sistematika dari penulisan dan pembahasan skripsi ini secara rinci sebagai berikut ini :

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian bab yang berisikan latar belakang dari masalah yang akan diteliti. Bab pendahuluan juga memuat penjelasan mengenai alasan ketertarikan dalam memilih dan mengangkat permasalahan yang dirasa menarik untuk diteliti. Dengan demikian, untuk mempermudah batasan masalah yang akan di bahas, dalam bab ini akan memuat rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori, bagian ini akan memaparkan hasil temuan pustaka dari sumber penelitian terdahulu, jurnal, ataupun buku yang digunakan sebagai bahan rujukan yang relevan dengan masalah penelitian. Kemudian juga bagian ini akan menjelaskan landasan teori-teori yang digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang akan dilakukan dalam bagian ini adalah memaparkan bagaimana gambaran umum dari kehidupan pers dari di Indonesia hingga peranan pers sebagai media kontrol sosial, menguraikan latar dari Majalah Tempo seperti sejarah hidup-mati nya perusahaan,

karakteristik majalah, serta bagaimana kedudukan Tempo dalam sudut pandang geopolitik pers.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini akan menjelaskan jenis penelitian, metode, dan ilmu bantu yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan agar mempermudah proses penyeleksian objektivitas sumber-sumber yang akan digunakan sebagai rujukan penelitian. Pada bagian ini akan digunakan metode sejarah yang merujuk kepada Ernst Bernheim yaitu: (1) heuristik, merupakan bagian dari proses pengumpulan sumber. (2) kritik, bagian untuk memverifikasi sumber yang telah terkumpul relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh karena itu, bagian kritik dibagi menjadi kritik eksternal dan kritik internal. (3) interpretasi, merupakan bagian yang digunakan untuk menafsirkan analisis dari permasalahan yang akan diteliti. (4) historiografi, merupakan bagian akhir dari metode sejarah, digunakan untuk menuliskan narasi dari hasil analisis yang ditemukan dalam melakukan penelitian.

Bab IV Dari Century Hingga Hambalang : News & Views Majalah Tempo terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), merupakan bagian yang akan menuliskan hasil dari jawaban permasalahan penelitian yang telah dituliskan pada rumusan masalah. Bagian ini akan berfokus kepada analisis dan narasi yang dituliskan berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh selama melakukan kegiatan pengumpulan data, verifikasi, dan analisa.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, menjadi bagian akhir dalam rangkaian penulisan skripsi yang menyajikan paragraph kesimpulan dari hasil jawaban pertanyaan permasalahan penelitian yang diteliti pada bagian pembahasan. Kemudian terdapat juga bagian rekomendasi penelitian selanjutnya dengan topik pembahasan yang mirip.